

**PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU: SOLUSI
PEMANFAATAN RUANG, PEMANFAATAN SUMBERDAYA DAN
PEMANFAATAN KAPASITAS ASIMILASI WILAYAH PESISIR
YANG OPTIMAL DAN BERKELANJUTAN**

Mahfud Effendy

*Dosen Jurusan Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo
E-mail : mahfudfish@gmail.com*

ABSTRAK

Peranan sumberdaya pesisir diperkirakan akan semakin meningkat dimasa-masa mendatang dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, regional, maupun lokal. Sehingga, untuk dapat memanfaatkan ruang dan sumberdaya wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan, perlu pemahaman yang mendalam tentang pengertian dan karakteristik dari kawasan ini serta masyarakat yang mendiaminya. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu memiliki pengertian bahwa pengelolaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dilakukan melalui penilaian menyeluruh (*comprehensive assesment*), menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya. Tulisan ini berupaya memberikan pemahaman secara komprehensif dan berisi tinjauan akademik tentang potensi wilayah pesisir, permasalahan yang terjadi dan peluang pemanfaatannya.

Kata Kunci : wilayah pesisir, pengelolaan terpadu, potensi

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir akhir-akhir ini menjadi topik yang seksi dibicarakan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur sebagai respon terhadap pembangunan infrastruktur jembatan suramadu dan munculnya limbah industri lumpur panas lapindo yang mengalir sampai jauh ke laut. Hasil sebuah studi riset proyek pesisir baru-baru ini mengungkapkan bahwa lebih dari 83% masyarakat Indonesia menguatirkan kondisi dan masa depan lingkungan laut, tetapi yang sangat disayangkan dari hasil survei tersebut terungkap bahwa hanya sedikit dari masyarakat Indonesia (sekitar 25%) yang mengerti tentang sumberdaya pesisir dan lautannya. Jelas sekali bahwa kita mempunyai tugas yang besar dalam mendidik pengguna wilayah pesisir serta masyarakat umum untuk membangun konstituensi. Melalui tulisan ini kami ingin

berbagi pengetahuan tentang bagaimana mengelola wilayah pesisir, sehingga sumberdaya pesisir yang beraneka ragam ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

**DEFINISI PESISIR DAN
MASYARAKAT PESISIR**

Sampai sekarang belum ada definisi wilayah pesisir yang baku, namun demikian, terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan (*interface area*) antara ekosistem daratan dan laut. Definisi dan batas wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah wilayah dimana daratan berbatasan dengan laut. Batas ke arah darat meliputi (1) secara ekologis: kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan seperti pasang-surut, angin laut, dan intrusi air laut; (2) secara

administrasi: batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbiter 2 km dari garis pantai. Sedangkan batas ke arah laut meliputi (1) secara ekologis: kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi, dan mengalirnya air tawar kelaut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan; (2) secara administrasi: batas 4 mil dari garis pantai ke arah laut.

Adapun yang dimaksud dengan masyarakat pesisir adalah berbagai pihak (baik perorangan, kelompok lembaga, maupun badan hukum) yang bermukim di wilayah pesisir dan memiliki mata pencaharian yang berasal dari sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir. Berdasarkan basis tempat tinggal dan mata pencaharian tersebut dapat dipetakan komponen masyarakat pesisir yakni nelayan, petani ikan, pemilik atau pekerja industri pariwisata, pemilik atau pekerja industri pariwisata, pemilik atau pekerja perusahaan perhubungan laut, pemilik dan pekerja pertambangan dan energi, pemilik dan pekerja industri maritim galangan kapal.

POTENSI WILAYAH PESISIR

Peranan sumberdaya pesisir diperkirakan akan semakin meningkat dimasa-masa mendatang dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, regional, maupun lokal. Ada dua alasan pokok yang mendukung kecenderungan diatas. Pertama pertumbuhan penduduk semakin meningkat yang akan mendorong permintaan terhadap sumberdaya pesisir, dan kedua Indonesia secara komparatif memiliki sumberdaya pesisir dan laut yang beragam dalam jumlah

besar. Untuk itu upaya menggerakkan perekonomian bangsa dengan menerapkan strategi pembangunan industri berbasis sumberdaya alam (*resources based industries*) yang dibangun melalui penerapan iptek dan manajemen profesional, mengharuskan kita mengetahui potensi kekayaan yang tersimpan di kawasan pesisir dan lautan sebagai aset pembangunan bangsa.

Dahuri (2003) merinci bahwa dalam suatu wilayah pesisir dan lautan terdapat satu atau lebih lingkungan ekosistem dan sumberdaya. Ekosistem ini dapat bersifat alami ataupun buatan. Ekosistem alami yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan antara lain: terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, pantai berpasir, formasi pes-caprea, formasi baringtonia, estuaria, laguna, dan delta. Sedangkan ekosistem buatan antara lain berupa: tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan agroindustri, dan kawasan pemukiman.

Sumberdaya di wilayah pesisir dan lautan terdiri dari sumberdaya alam yang dapat pulih, dan sumberdaya alam yang tidak dapat pulih. Sumberdaya yang dapat pulih (sumberdaya perikanan laut, mangrove, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, dan bahan-bahan bioaktif) maupun sumberdaya yang tidak dapat pulih (minyak bumi, gas, mineral, pasir, dan bahan tambang lainnya) serta berbagai macam energi kelautan (gelombang, pasang surut, ocean thermal energy conversion, dan angin) dan jasa-jasa lingkungan (media transportasi dan komunikasi, pengaturan iklim, keindahan alam, dan penyerapan limbah). Keseluruhan ekosistem dan sumberdaya ini berpotensi sebagai aset ekonomi, ekologi, pendidikan dan

penelitian, pertahanan dan keamanan bagi suatu negara.

Potensi ekonomi sumberdaya pesisir dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan atau kegiatan ekonomi yang menggunakan sumberdaya pesisir. Bidang kelautan ini meliputi sektor-sektor produktif yang terdiri dari sektor: (1) kegiatan perikanan; (2) kegiatan pariwisata bahari; (3) kegiatan pertambangan dan energi; (4) kegiatan perhubungan laut; (5) kegiatan industri maritim; dan (6) kegiatan pembangunan kelautan. Potensi ekologis sumberdaya pesisir dapat didefinisikan sebagai peran pesisir sebagai pengatur keseimbangan lingkungan, keseimbangan iklim, dan keseimbangan panas bumi. Potensi pertahanan dan keamanan wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai peran pesisir untuk menjaga kedaulatan negara khususnya pesisir pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain. Sementara potensi pendidikan dan penelitian wilayah pesisir dapat diartikan bahwa wilayah pesisir memiliki peran sebagai media pembelajaran dan kegiatan riset untuk menunjang pembangunan ekonomi.

PERMASALAHAN WILAYAH PESISIR

Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pesatnya kegiatan pembangunan di pesisir bagi berbagai peruntukan (industri, pelabuhan, tambak, pemukiman), maka tekanan ekologis terhadap ekosistem pesisir semakin meningkat pula. Meningkatnya tekanan ini tentunya dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pesisir baik

secara langsung (misalnya kegiatan konversi lahan untuk pembangunan jembatan penyeberangan) maupun tidak langsung (misalnya pencemaran oleh limbah industri pengeboran minyak).

Gambaran tentang pelaksanaan pembangunan pesisir yang berlangsung saat ini dicirikan dengan lima karakteristik: (1) pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan pada umumnya bersifat ekstraktif, tidak berkelanjutan dan hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk; (2) menciptakan ekonomi dualistik kesenjangan yang menganga antara kelompok pengusaha kecil (tradisional) dengan kelompok usaha besar (komersial); (3) kawasan pesisir sebagai keranjang sampah dari berbagai jenis limbah dan sedimen yang berasal dari kegiatan di darat; (4) konflik egoisme sektoral, dimana sektor-sektor yang dapat menghasilkan cash money jangka pendek dan tidak memerlukan lingkungan yang tinggi; (5) ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan dan kerusakan lingkungan antar wilayah. Penyebab kurang berhasilnya pembangunan pesisir saat ini antara lain: (1) penerapan paradigma pola pembangunan yang secara dominan mengejar keuntungan jangka pendek dan kurang mengindahkan aspek keberlanjutan; dan (2) mekanisme pembangunan yang sentralistik, topdown, dan sektoral.

Pembangunan di wilayah pesisir yang merupakan proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, tidak terlepas dari aktifitas pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir juga aktifitas pemanfaatan jasa asimilasi lingkungan pesisir. Aktifitas-aktifitas ini sering melakukan perubahan-perubahan pada sumberdaya alam. Perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya akan memberikan

pengaruh pada lingkungan hidup. Makin tinggi laju pembangunan, makin tinggi pula tingkat pemanfaatan ruang, sumberdaya dan jasa asimilasi dan makin besar pula perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup yang mengancam kapasitas keberlanjutannya (sustainable capacity).

Berbagai kasus seperti kondisi tangkap lebih (*over fishing*), pencemaran perairan, degradasi fisik habitat pesisir (mangrove dan terumbu karang), dan abrasi pantai merupakan sebagian indikator bahwa pelaksanaan pembangunan sumberdaya pesisir menuju ke arah yang tidak optimal dan tidak berkelanjutan (unsustainable). Kondisi ini telah memberikan tekanan lingkungan yang kompleks dan membengkok terhadap wilayah pesisir dan lautan terutama berupa (1) konflik pemanfaatan sumberdaya; (2) konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan lautan; dan (3) pemanfaatan kapasitas asimilasi wilayah pesisir yang melebihi daya dukungnya. Hal ini sebagai akibat dari kurangnya koordinasi dan kerjasama antar pelaku pembangunan kawasan pesisir, rendahnya kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan pesisir, dan lemahnya penegakan hukum.

PENGELOLAAN SECARA TERPADU

Untuk dapat mewujudkan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (*integrated coastal zone management*). Pilihan ini didasarkan pada : (1) wilayah pesisir merupakan multiple use zone dimana terdapat lebih dari dua macam sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan serta terdapat lebih dari dua macam pemanfaatan kawasan

pesisir; (2) karakteristik dan dinamika alamiah the nature sumberdaya pesisir dan lautan yang secara ekologis saling terkait satu sama lain termasuk dengan ekosistem lahan atas; (3) wilayah pesisir dihuni lebih dari satu kelompok etnis yang memiliki preferensi mata pencaharian yang berbeda.

Pengelolaan pesisir dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang terjadi di wilayah pesisir. Keseluruhan proses diatas menurut Sorensen dan McCreary (1990), harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan dinamis dengan mempertimbangkan segenap aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspirasi masyarakat pengguna kawasan pesisir dan lautan serta konflik pemanfaatan sumberdaya dan konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan lautan yang mungkin ada. Keterpaduan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan ini mencakup empat aspek (Dahuri et al 2001): (1) keterpaduan ekologis; (2) keterpaduan sektoral; (3) keterpaduan disiplin ilmu; dan (4) keterpaduan stakeholders.

Keterpaduan ekologis: secara ekologis wilayah pesisir memiliki keterkaitan antara lahan atas (daratan) dan lautan. Hal ini disebabkan karena wilayah pesisir merupakan wilayah pertemuan antara daratan dan lautan. Dengan keterkaitan kawasan tersebut maka pengelolaan kawasan pesisir tidak terlepas dari pengelolaan lingkungan di kedua wilayah tersebut. Berbagai dampak lingkungan yang terjadi pada kawasan pesisir merupakan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan yang dilakukan dilahan atas seperti industri pengeboran minyak, pemukiman, pertanian dan sebagainya.

Demikian pula dengan kegiatan yang dilakukan di laut lepas seperti kegiatan pengeboran minyak lepas pantai, perhubungan laut. Penanggulangan pencemaran dan sedimentasi yang diakibatkan oleh limbah industri tidak dapat dilakukan hanya di kawasan pesisir saja tetapi harus dilakukan mulai dari sumber dampaknya. Oleh karena itu pengelolaan wilayah ini harus diintegrasikan dengan pengelolaan wilayah daratan dan laut.

Keterpaduan sektor: sebagai konsekuensi dari besar dan beragamnya sumberdaya alam di kawasan pesisir adalah banyaknya instansi atau sektor-sektor pembangunan yang bergerak dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. Akibatnya seringkali terjadi tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya pesisir antara satu sektor dengan sektor lainnya. Kegiatan suatu sektor tidak dibenarkan mengganggu apalagi sampai mematikan kegiatan sektor lain. Penyusunan tata ruang dan panduan pembangunan wilayah pesisir sangat perlu dilakukan untuk menghindari benturan antara satu kegiatan dengan kegiatan pembangunan lainnya. Oleh karena itu pengelolaan wilayah ini dalam perencanaannya harus mengintegrasikan kepentingan semua sektoral.

Keterpaduan disiplin ilmu: wilayah pesisir memiliki sifat dan karakteristik yang unik dan spesifik, baik sifat dan karakteristik ekosistem pesisir maupun sifat dan karakteristik sosial budaya masyarakatnya. Oleh karena itu dibutuhkan keterpaduan disiplin ilmu dalam pengelolaan wilayah pesisir, mengikuti karakteristik ekosistem dan sosial budaya masyarakatnya.

Keterpaduan stakeholder: segenap keterpaduan diatas akan berhasil diterapkan

apabila ditunjang oleh keterpaduan dari pelaku dan pengelola pembangunan di wilayah pesisir. Seperti diketahui bahwa pelaku pembangunan dan pengelola sumberdaya pesisir antara lain terdiri dari pemerintah, masyarakat, swasta, dan juga lembaga swadaya masyarakat yang masing-masing memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir. Penyusunan perencanaan pengelolaan terpadu harus mampu mengakomodir segenap kepentingan pelaku pembangunan pesisir. Oleh karena itu perencanaan pengelolaan pembangunan harus menggunakan pendekatan dua arah, yaitu pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*.

Dengan latar belakang pemikiran diatas akan muncul model pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan *sustainable development* yang mengandung tiga unsur utama yang meliputi dimensi ekonomi, ekologi dan sosial (Harris et al, 2001 dalam Dahuri, 2003). Suatu pembangunan kawasan pesisir, pertama secara ekonomi dianggap berkelanjutan (*economic growth*) jika kawasan tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa secara berkesinambungan; kedua secara ekologis dianggap berkelanjutan (*ecological sustainability*) manakala basis ketersediaan sumberdaya alamnya dapat dipelihara secara stabil, tidak terjadi eksploitasi berlebih terhadap sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, tidak terjadi pembuangan limbah melampaui kapasitas asimilasi lingkungan yang dapat mengakibatkan kondisi tercemar, serta pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui yang dibarengi dengan pengembangan bahan substitusinya secara memadai, dan ketiga secara sosial dianggap

berkelanjutan (*social equity*) apabila kebutuhan dasar seluruh penduduknya terpenuhi; terjadi distribusi pendapatan dan kesempatan berusaha secara adil. Menurut Bengen (2004) pembangunan sumberdaya pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan terwujud apabila memenuhi tiga persyaratan ekologis: (1) pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan yang sesuai dengan daya dukungnya; (2) pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan lautan yang harmonis; dan (3) pemanfaatan kapasitas asimilasi wilayah pesisir sesuai dengan daya dukung lingkungan.

KESIMPULAN

Dengan keseluruhan uraian tersebut diatas maka sampailah pada suatu kesimpulan bahwa jika kita menerapkan pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu pada pembangunan industri dan infrastruktur di wilayah pesisir, maka pembangunan pesisir yang optimal dan berkelanjutan (*sustainable development*) akan dicapai yakni suatu upaya pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam serta jasa asimilasi lingkungan yang terdapat dikawasan pesisir untuk kesejahteraan manusia sedemikian rupa sehingga laju pemanfaatannya tidak melebihi daya dukung (*carrying capacity*) kawasan pesisir untuk menyediakannya. Pun, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan manusia saat ini tanpa menurunkan atau menghancurkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bengen DG. 2004. Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaannya. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Dahuri R. 2003. Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan. Naskah Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Dahuri, R., Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, dan M.J. Sitepu. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu. PT Pradnya Paramita, Jakarta. 326 hal.
- Harris, et al. 2001. A survey of Sustainable Development: Social and Economic Dimensions. Tufts University, Island Press, Washington.
- Sorensen, J.C. and Mc Creary. 1990. Coast: Institusional Arrangement or Managing Coastal Resources. Research Planning Institute Inc, Carolina.